

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Secara umum pendidikan dimaknai sebagai proses kegiatan mengubah perilaku individu menuju kedewasaan dan kematangan (Sumaatmadja, 2002: 40). Kematangan atau kedewasaan dimaksud dalam konteks Pendidikan Nasional di Indonesia diarahkan pada terbentuknya sosok manusia yang utuh (*Insan Kamil*). Upaya untuk mewujudkan insan kamil tersebut bersifat universal dan menjadi hak asasi setiap individu, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, meskipun dalam bentuk dan derajat yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, hakikat pendidikan pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan segenap potensi dirinya, tanpa melihat sisi perbedaan fisik, mental, etnis, agama, sosial, dan ekonomi.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3 UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Tujuan pendidikan nasional tersebut di atas dijadikan acuan dalam perumusan visi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 yaitu “Terselenggaranya layanan prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Indonesia Cerdas dan Komprehensif”. Visi Kementerian Pendidikan Nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi Pendidikan Nasional sebagai berikut: “(1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (5)

menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan” (Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010- 2014). Ketercapaian tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional salah satunya ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam memberikan hak-hak yang sama kepada setiap anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.

Ditinjau dari sisi hak-hak anak, setiap individu warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan /atau sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal. 5 ayat 1 dan 2 UU No. 20 tahun 2003). Hal ini sejalan dengan pandangan filosofis pendidikan berbasis keadilan sosial. Secara konseptual pendidikan yang berkeadilan sosial dapat dirumuskan sebagai pendidikan yang menganut prinsip keseimbangan dan pemerataan hak dan kewajiban pendidikan berdasarkan pada kemajemukan, keyakinan beragama, gender, ekonomi, abilitas pribadi, dan akses informasi dari semua warga negara. Realita sosial yang pruralis dan heterogen dapat benar-benar dijadikan sebagai kekuatan akar rumput (*grass root*) dalam membangun model pendidikan yang berkeadilan sosial, kepentingan masyarakat benar-benar terayomi (Mulyana, dalam <http://pmibandung.woedpress.com/2007/07>).

Ditinjau dari ajaran agama Islam, keberadaan manusia dihadapan Allah SWT itu sama. Essensi perbedaan manusia satu dengan yang lainnya dihadapan Allah tidak dilihat dari hal-hal yang bersifat fisik-lahiriyah, tetapi dinilai dari tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Pada dasarnya fitrah manusia itu dijadikan berbeda-beda (*Plural-tidak homogen tetapi heterogen-majemuk*). Kemajemukan tersebut bukan diperuntukkan untuk saling mendiskriminasikan, tetapi untuk saling mengenal, bekerja sama satu sama lain. Allah SWT sebagai *Kholiq* (Yang Maha Pencipta) tidak membeda-bedakan manusia dari rupa dan sisi lahiriyah ataupun status sosialnya di masyarakat, tetapi dihadapan Allah manusia yang paling beriman dan bertaqwalah yang membedakan manusia satu dengan lainnya (*QS:Alhujurat:13*, tafsir Shihab (2002:261). Allah SWT tidak memandang kepada bentuk tubuh dan rupa manusia, tetapi Dia memandang pada hati manusia” (HR.

Muslim dalam, Imam Nawawi, penterjemah Sunarto, Achmad, 1999:7). Maha suci Allah yang Maha Adil. Esensi ayat *Al-Qur'an* dan *Hadist* tersebut mengusung nilai-nilai inklusif dan kebersamaan.

Kenyataan dalam kehidupan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebersamaan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kasus-kasus ketidakbersamaan dalam kehidupan di masyarakat terjadi dari persoalan umum sampai pada tataran praktek pendidikan. Fenomena tawuran menjadi masalah sosial yang mewarnai perilaku sebagian masyarakat, bahkan terjadi pada siswa sekolah dasar, seperti di Jakarta Timur (Tempo, 16 Mei 2010). Persoalan anak putus sekolah juga menggambarkan adanya masalah dalam hal implementasi nilai-nilai kebersamaan. Data Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa kasus putus sekolah yang paling menonjol terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %, di tingkat SD tercatat 23 %, di tingkat SMA 29 %. Kalau digabungkan kelompok usia remaja, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77%. (www.ayomerdeka, 22 Maret 2008).

Akses memperoleh layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang dalam tulisan ini selanjutnya akan digunakan istilah ABK, menunjukkan persoalan serius. Masalah aksesibilitas ini terbentur dengan persoalan pemahaman, persepsi dan perlakuan terhadap layanan pendidikan ABK, misalnya kasus kesulitan mencari sekolah inklusif bagi ABK yang dialami oleh seorang ibu di daerah Tangerang Selatan (Republika, Rabu 24 Februari 2010), sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin (Komisi Hukum Nasional, Selasa, 04 September 2007), sulitnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat terpencil (Suryadi:2006:32), diskriminasi pendidikan yang dialami anak penyandang HIV karena terinfeksi dari orang tuanya (Intisari, Juni 2010). Fenomena buta huruf karena faktor kemiskinan masih kerap dijumpai yang dapat mengakibatkan negeri ini terpuruk karena kualitas sumber daya manusianya tidak mampu bersaing dengan negara-negara yang lain.

Dalam perspektif keadilan memperoleh layanan pendidikan, fenomena ketidakbersamaan masih menjadi bagian dari potret dunia pendidikan. Belum tersentuhnya anak-anak usia sekolah dari populasi masyarakat miskin,

mencerminkan persoalan keadilan dan ketidakbersamaan dalam praktik pendidikan (Shihab, Talkshow 13 November 2008). Masalah ketidakbersamaan di bidang pendidikan antara masyarakat kaya dan miskin juga terungkap dalam acara Talkshow III di Batu TV Malang yang menyatakan bahwa adanya persoalan kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan.

Persoalan marginalitas dalam pendidikan masih merupakan permasalahan yang mewarnai nilai-nilai kebersamaan, misalnya kasus sebanyak 174 anak usia sekolah dasar di daerah Jonggol, tidak memperoleh kesempatan memperoleh layanan pendidikan (Republika, 17 Februari 2010).

Dalam konteks layanan pendidikan ABK, kenyataannya masih dihadapkan pada persoalan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan. Data dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan ABK di Indonesia mencapai sebanyak 324.000 orang. Dari 324.000 ABK, baru 75.000 anak yang sudah tersentuh pendidikan, sedangkan sisanya sebanyak 249.000 belum tersentuh pendidikan. (www.google.com). Secara kuantitatif hingga saat ini baru sekitar 20 persen dari 346.800 anak lebih yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah khusus. (Kompas.com, 14 Desember 2009). ABK usia dini yang mengikuti pendidikan, baru terlayani sekitar 34% (jugaguru.com, 14 April 2007).

Dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai kebersamaan salah satunya dapat dikembangkan dalam *setting* sekolah inklusif, nyatanya masih dihadapkan pada persoalan penolakan sosial (Republika, Rabu 24 Februari 2010). ABK yang sudah masuk sekolahpun, masih banyak yang mengalami putus sekolah. Data di Provinsi Jawa Barat menunjukkan terdapat 12.041 anak usia wajib pendidikan dasar yang tidak bersekolah (Pikiran Rakyat, 13 November, 2008). Khusus untuk ABK, dari 62.320 ABK, hanya 16.750 ABK yang bisa bersekolah (Republika, 4 Mei 2010).

Permasalahan lainnya yang menyangkut implementasi nilai-nilai kebersamaan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, adalah persepsi yang salah terhadap sosok ABK. Fakta ini menunjukkan bahwa belum semua orang tua

peserta didik memahami dan mau menerima keberadaan ABK untuk bersekolah di sekolah umum (Republika, 30 September 2009). Masalah persepsi ini tidak hanya ditunjukkan oleh orang tua peserta didik yang secara akademis awam tentang pendidikan, tetapi nyatanya dikalangan praktisi pendidikan juga, tidak jarang menunjukkan sikap dan persepsi yang kurang menguntungkan terhadap ABK. Dari hasil telaah kasus, ditemukan 3 alasan keengganan sekolah umum menerima ABK, yaitu: (1) guru-guru di sekolah umum belum memahami dan belum terbiasa mengajar ABK; (2) sekolah umum belum memiliki kurikulum, program pembelajaran dan metode khusus untuk belajar ABK; dan (3) adanya kekhawatiran dari sebagian orang tua peserta didik reguler dengan kehadiran ABK di sekolah umum. Kondisi seperti ini memaksa orang tua ABK menyekolahkan anaknya di SLB yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. (Irawan, Agus, S. Laporan Konseling Keluarga, 2009:21). Aspek sosial ekonomi orang tua peserta didik juga merupakan faktor pemicu lainnya yang menyebabkan aksesibilitas ABK terhadap layanan pendidikan mengalami hambatan (Tim Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi Anak Autis PPPPTK TK dan PLB, 2010).

Uraian kasus-kasus sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebersamaan dalam praktek pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: (1) masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pendidikan untuk semua (*education for All*), tanpa membedakan kondisi sosial ekonomi, fisik, mental, akademik, ras, etnis, dan agama; (2) masih rendahnya komitmen sekolah umum untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang ditandai dengan belum memadainya kurikulum, program pembelajaran, dan guru-guru yang siap melayani pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Dari analisis kasus empirik tersebut, sampailah pada sebuah persoalan bahwa implementasi nilai-nilai kebersamaan sebagai salah satu nilai inti (*core values*) sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya model layanan pendidikan di sekolah inklusif, masih membutuhkan sebuah upaya yang terus menerus dilakukan. Berbagai upaya dimaksud, dapat dilakukan melalui kajian literatur, penelitian dan pengembangan sampai pada implementasi regulasi yang mendukung terciptanya nilai-nilai kebersamaan dimaksud.

Selama ini pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional) bersama-sama dengan masyarakat telah berusaha melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan yang berbasis keadilan sosial melalui penyelenggaraan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Bagi anak-anak yang memiliki kelainan, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Khusus untuk semua jenjang, yaitu TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB. Dalam perkembangannya pemerintah juga mengembangkan pendidikan inklusif. Secara operasional wujud pendidikan inklusif yaitu satuan pendidikan (Sekolah) yang mengakomodasi semua Anak Berkebutuhan Khusus. Secara normatif, sekolah Inklusif adalah sekolah yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan, baik kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, tenaga administrasi dan lingkungan sekolah/masyarakat).

Pengembangan sekolah inklusif bahkan telah mendapatkan dukungan dan pembenaran dari UNESCO.” ... sekolah harus mengakomodasi anak, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan kondisi lainnya (UNESCO: *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Para 1994:3*). Kebijakan pendidikan disemua tingkat harus secara jelas mencantumkan bahwa seorang anak yang menyandang kelainan seharusnya bersekolah di sekolah dekat tempat tinggalnya bersama-sama dengan anak-anak lainnya (UNESCO: *Dakar Framework for Action, 2000*).

Pendidikan inklusif menekankan perlunya anak-anak yang selama ini termarginalkan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan berpartisipasi dalam pembelajarannya. Dalam konsep ini terkandung makna yang sangat mendasar tentang pendidikan inklusif yaitu bahwa pendidikan inklusif memberikan akses yang seluas-luasnya bagi semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, mental, status sosial ekonomi, etnis, dan agama.

Pandangan di atas menjelaskan bahwa konsep pendidikan inklusif memberikan jaminan yang seluas-luasnya bagi terwujudnya “Pendidikan Untuk Semua” (PUS) atau *Education for All* (EFA). Manakala dikaitkan dengan konsep pendidikan umum (*General Education*), jelaslah bahwa konsep pendidikan inklusif merupakan sebuah model pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan secara utuh dalam konteks kebersamaan, baik dalam hak, layanan,

maupun cara pandang manusia yang menempatkan pada *learning live together*. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Dresser dan Lorimer (1960:570), Henry (1952:11), tentang pendidikan umum yang esensinya berupaya menyajikan pendidikan yang berorientasi pada praktek pendidikan yang humanistik, peduli pada ide-ide dan manusia, pengembangan seluruh pribadi dalam hubungannya dengan masyarakat, memperhatikan siswa sebagai *human being*, dan pengembangan individu dalam skala yang lebih luas, emosional, dan moral, juga intelektual secara integral. Dengan demikian, pendidikan umum peduli sekali terhadap pembinaan pribadi manusia dalam konteks kebersamaan.

Dalam perspektif pendidikan sebagai wahana pembelajaran (*learning organization*), pendidikan inklusif akan mendorong terjadinya interaksi yang sehat dan wajar antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler bahkan dengan warga sekolah yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut dapat dipahami dari pandangan filosofis tentang pendidikan inklusif, sebagaimana dikemukakan oleh Sunanto dkk. (2004:4), bahwa “kehadiran pendidikan inklusif, bukan hanya sekedar menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, namun lebih pada upaya membaurkan kehadiran anak berkebutuhan khusus dalam dimensi psikologis, akademis, sosial, dan kultur serta institusional”.

Dari pandangan filosofis pendidikan inklusif tersebut di atas jelaslah bahwa model pendidikan inklusif memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi terjadinya internalisasi nilai-nilai kebersamaan antara anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya. Nilai-nilai kebersamaan yang dapat dikembangkan dalam *setting* sekolah inklusif, akan memberikan jaminan terwujudnya interaksi sosial yang sehat dan wajar antara anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik lainnya. Berdasarkan pada asumsi tersebut, jelaslah bahwa implementasi pendidikan inklusif memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga sekolah untuk mewujudkan nilai-nilai kebersamaan, antara anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler.

Manakala nilai-nilai kebersamaan telah terwujud dalam *setting* sekolah inklusif, maka sesungguhnya kehadiran sekolah inklusif tidak hanya menampilkan model atau strategi pembelajaran dalam dimensi akademis, akan

tetapi jauh lebih bermakna untuk menghasilkan sebuah pengembangan model internalisasi nilai-nilai kebersamaan secara melembaga, bukan hanya kebersamaan dalam konteks interaksi pembelajaran di dalam kelas.

Internalisasi nilai-nilai dalam prakteknya akan terkait erat dengan pemahaman, persepsi, dan sistem nilai yang menyertai aktivitas suatu lembaga atau institusi. Misalnya, upaya internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif akan terkait dengan sejauhmana warga sekolah inklusif seperti kepala sekolah, guru, peserta didik reguler dan orang tuanya memahami filosofis dan konsep pendidikan inklusif? Pemahaman ini akan memberikan pertimbangan sikap terhadap persepsi dan juga pertimbangan moral dalam memperlakukan kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Kenyataan menunjukkan, walaupun secara filosofis dan normatif pendidikan inklusif telah memperoleh pijakan yang kuat, tetapi dalam praktek penyelenggaraannya masih dihadapkan kepada kendala-kendala, baik kendala yuridis, birokratis, maupun psikologis. Dari hasil studi pendahuluan dan diskusi ilmiah dalam forum pendidikan, mengemuka beberapa persoalan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pendidikan inklusif sering kali sangat kompleks dan kontroversi, antara lain karena: (a) kompetisi dan orientasi pasar; (b) sikap negatif terhadap anak-anak yang selama ini termarginalkan; dan (c) kurang adanya informasi tentang bagaimana sekolah dan birokrasi agar lebih inklusif.
2. Masih dijumpai adanya kebijakan yang bertolakbelakang dengan tujuan dan visi pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang paradok dijumpai dalam beberapa ketentuan hukum berikut: (a) setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus (Pasal 41 PP 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional); (b) Anak cacat yang mengikuti program pendidikan terpadu, adalah mereka yang memiliki kemampuan mengikuti pendidikan dengan anak normal di lembaga pendidikan berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan oleh tenaga ahli yang relevan (Kepmendikbud 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu

untuk Anak-anak Cacat); dan (c) setelah lebih dari lima tahun proyek pendidikan inklusif, hanya sebagian kecil sekolah umum yang menjadi sekolah inklusif, misalnya: 1) di Provinsi DIY, dari lima ribu sekolah, hanya 123 sekolah inklusif; 2) di Provinsi Jateng, dari 25 ribu sekolah, hanya ada 117 sekolah inklusi. Di Jawa Barat, jumlah sekolah inklusif masih minim, yaitu 186 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 139 sekolah dasar, 15 sekolah menengah pertama, 1 madrasah tsanawiah, 24 sekolah menengah atas, dan 3 madrasah aliyah. (Pikiran Rakyat, 13 november 2008). Walaupun di Jawa barat sampai tahun 2013 menunjukkan terdapat 462 sekolah, mulai SD hingga SMA yang sudah mendapat izin menerapkan program inklusif (Pikiran Rakyat, 7 Oktober 2013), tetapi keberadaan sekolah inklusif yang benar-benar melakukan pengelolaan dan memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan standar pengelolaan sekolah inklusif masih minim.

Dari *interview* awal dengan beberapa sekolah penyelenggara sekolah inklusif, nyatanya belum semua warga sekolah inklusif memahami filosofis, konsep, dan teknis operasional tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Hal ini memberikan dampak terhadap persepsi dan cara perlakuan warga sekolah terhadap kehadiran ABK di sekolah inklusif. Sebuah artikel dalam harian republika yang ditulis oleh Yuningsih (Republika, 30 September 2009), menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif dalam wujud sekolah inklusif masih menghadapi adanya resistensi terhadap kehadiran ABK di sekolah inklusif. Resistensi tersebut tidak saja datang dari pihak orang tua dan beberapa unsur pengelola sekolah, tetapi juga berimbas ke peserta didik reguler. Hal ini apabila tidak dicarikan solusinya dari sisi kebijakan akan menghambat program pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia dan secara psikologis berdampak buruk bagi pengembangan kemampuan interaksi sosial anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji data empiris yang dilakukan sekolah terkait dengan strategi sekolah dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan kepada peserta didiknya di sekolah inklusif. Data empiris tersebut selanjutnya dijadikan bahan analisis untuk

mengembangkan strategi internalisasi nilai kebersamaan yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah inklusif.

Implementasi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif, akan berinterelasi dengan faktor-faktor kontekstual sekolah. Masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dimanfaatkan dalam mengimplementasikan internalisasi nilai-nilai kebersamaan dimaksud. Terkait dengan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan unit sekolah sebagai fokus studi kasus dalam mengembangkan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif .

Analisis *setting* pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam penelitian ini akan digali dari analisis studi kasus terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan pada analisis studi awal, studi kasus dalam penelitian ini mengambil *setting* penelitian disalah satu sekolah dasar inklusif di Kota Bandung, yakni SD Negeri Puteraco Indah.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Puteraco Indah memiliki keunikan dari sisi jumlah dan jenis anak berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah, dan periode penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah dirintis sejak tahun 2004 sebagai bagian dari proyek percontohan model sekolah inklusif dinas pendidikan provinsi Jawa Barat . Data tahun ajaran 2010- 2011 menunjukkan, jumlah keseluruhan peserta didik di SDN inklusif Puteraco Indah sebanyak 134 orang peserta didik, 79 (58,95%) diantaranya adalah ABK.

Dari hasil pengamatan awal dalam situasi pembelajaran dan di saat aktivitas di luar kelas di SDN Puteraco Indah, dan beberapa sekolah inklusif di kota Bandung nampak bahwa interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler secara umum cukup baik. Pada umumnya peserta didik reguler menunjukkan sikap yang wajar dalam bergaul dengan ABK. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal dengan pihak guru, terkadang muncul perilaku dari ABK (anak autisme) yang menimbulkan pemahaman keliru dari peserta didik reguler. Misalnya ada anak autisme yang tanpa permisi dulu langsung mengambil pensil temannya atau mendorong-dorong temannya. Kejadian ini nampak seperti dalam kegiatan bermain di waktu istirahat atau dalam kegiatan di

dalam kelas yang masih menimbulkan respon rasa kesal dari temannya. Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan guru, mengemuka persoalan lain yang menyertai interaksi antara ABK dengan pesertadidik reguler, seperti kecenderungan untuk membiarkan ABK duduk di kelas ketika waktu istirahat, pertemanan yang khusus antara ABK dengan peserta didik reguler tertentu saja. Suasana seperti ini manakala didekati dalam perspektif pendidikan inklusif, akan menghambat terwujudnya nilai-nilai kebersamaan. Kondisi seperti ini merupakan modal alamiah yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam setting sekolah inklusif.

Sekolah Dasar Negeri Puteraco Indah menarik untuk ditelaah lebih mendalam sebagai *setting* penelitian dalam upaya merumuskan pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif. Permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara umum membutuhkan pemecahan yang komprehensif, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi internalisasi nilai moral yang dilakukan untuk mengatasi terhadap kenyataan masih adanya sikap-sikap negatif, terutama yang ditunjukkan oleh peserta didik reguler selama ia bergaul dalam proses pembelajaran terhadap ABK.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tergerak mengembangkan strategi internalisasi nilai moral kersamaan, yang secara bertahap diharapkan mampu mengubah sikap resistensi peserta didik reguler terhadap ABK ke arah tumbuhnya sikap-sikap yang positif, terutama mengenai sikap kebersamaan.

Dengan demikian fokus permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini yaitu: “Bagaimana mengembangkan strategi internalisasi nilai moral yang mampu dijadikan sebagai sarana pembentukan sikap kebersamaan pada diri peserta didik reguler, agar mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat menerima dan bergaul dengan ABK dalam *setting* sekolah inklusif?”. Peserta didik yang dijadikan sasaran internalisasi nilai kebersamaan diutamakan peserta didik kelas tinggi. Peserta didik kelas IV, V, dan VI berada pada rentang usia 8 1/2 s.d 14 tahun. Anak pada rentang usia tersebut, menurut pesrpektif

tahapan perkembangan moral anak berada pada fase memenuhi harapan lingkungan (*Peer –Oriented Morality*). Berdasarkan kajian Megawangi (133-144) terhadap teori-teori tahapan perkembangan moral anak, pada fase *Peer-Oriented Morality* anak sudah mengerti moral baik dan buruk (*golden rule*), sehingga akan lebih mudah dikondisikan dalam pelaksanaan internalisasi nilai-nilai kebersamaan (Megawangi: 133-144)

B Identifikasi dan Rumusan Masalah

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Puteraco Indah memiliki keunikan tersendiri dari sisi jumlah dan jenis anak berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah, dan periode penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada tahun 2004 SDN Puteraco Indah kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan penyelenggaraan sekolah inklusif dibawah pembinaan sub. Dinas Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini SDN Puteraco Indah masih menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan kondisi keadaan karakteristik kondisi keadaan peserta didik ABK yang lebih banyak dari peserta didik reguler.

Interaksi antara anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler secara umum cukup baik, akan tetapi terkadang muncul perilaku dari ABK (anak autis) yang menimbulkan pemahaman keliru dari peserta didik reguler. Kegiatan bermain di waktu istirahat atau dalam kegiatan di dalam kelas yang masih menimbulkan respon rasa kesal dari temannya. Persoalan lain yang menyertai interaksi antara ABK dengan siswa reguler, seperti kecenderungan untuk membiarkan ABK duduk di kelas ketika waktu istirahat, pertemanan yang khusus antara ABK dengan siswa reguler tertentu saja. Suasana seperti ini manakala didekati dalam perspektif pendidikan inklusif, akan menghambat terwujudnya nilai-nilai kebersamaan.

Pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya pengelolaan manajerial dan pengelolaan pembelajaran dalam seting inklusif, termasuk kearah implementasi nilai-nilai kebersamaan, namun belum dilakukan melalui analisis strategis yang mendalam. Kondisi seperti ini merupakan modal alamiah yang dapat

dimanfaatkan dalam mengembangkan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah inklusif SDN Puteraco Indah kota Bandung.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana mengembangkan strategi internalisasi nilai moral yang mampu dijadikan sebagai sarana pembentuk sikap kebersamaan pada diri peserta didik, agar mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat menerima dan bergaul dengan ABK dalam *setting* sekolah inklusif. Dari rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Bagaimanakah strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan peserta didik di SDN Inklusif Puteraco Indah Kota Bandung?
2. Bagaimanakah pelaksanaan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan peserta didik di SDN Inklusif Puteraco Indah Kota Bandung?
3. Bagaimanakah rumusan konsep pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di SDN Inklusif Puteraco Indah Kota Bandung?

C Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan rumusan konsep pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan peserta didik di sekolah inklusif, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan SD Negeri Inklusif Puteraco Indah Kota Bandung. Pengembangan strategi yang dihasilkan dari penelitian ini berupa rumusan konsep strategi sekolah dalam rangka internalisasi nilai-nilai kebersamaan dan konsep strategi pembelajaran internalisasi nilai-nilai kebersamaan yang dikembangkan melalui analisis SWOT. Produk penelitian yang berupa rumusan konsep strategi pembelajaran internalisasi nilai-nilai kebersamaan ditulis tersendiri dalam bentuk panduan pelaksanaan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan pada peserta didik di SDN Inklusif Puteraco Indah Kota Bandung yang merupakan bagian tak terpisahkan dari disertasi ini. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan uji empiris terhadap produk penelitian. Rumusan konsep pengembangan strategi internalisasi nilai

kebersamaan pada peserta didik ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah inklusif latar penelitian, yaitu SDN inklusif Puteraco Indah. Penggunaannya untuk sekolah lain membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah bersangkutan.

Makna pengembangan strategi internalisasi nilai kebersamaan dalam penelitian ini, dipahami dalam dua dimensi. *Pertama*, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi internalisasi nilai yang telah ada dalam beberapa kajian literatur, dan dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan. *Kedua*, dari dimensi unit analisis dan implementasinya, bahwa pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan ini digali dalam *setting* sekolah inklusif, khususnya SD Negeri Puteraco Indah kota Bandung dan diproyeksikan sebagai salah satu strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menggali, menganalisis data lapangan dan mengembangkan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan peserta didik terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan peserta didik di SDN inklusif Puteraco Indah Kota Bandung.
2. Pelaksanaan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan peserta didik di SDN inklusif Puteraco Indah Kota Bandung.
3. Rumusan konsep pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan yang sesuai dengan kebutuhan di SDN inklusif Puteraco Indah Kota Bandung dalam bentuk rumusan konsep strategi sekolah dan rumusan konsep pembelajaran dalam rangka internalisasi nilai-nilai kebersamaan. Khusus untuk rumusan konsep strategi pembelajaran dalam rangka internalisasi nilai-nilai kebersamaan secara lengkap disusun dalam bentuk panduan strategi pembelajaran nilai-nilai kebersamaan yang diperuntukkan sebagai suplemen dalam pelaksanaan pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah konsep dan teknis operasional dalam pengembangan strategi internalisasi nilai, khususnya nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* pendidikan inklusif. Internalisasi nilai, secara konseptual memang sudah banyak diteliti, namun kaitannya dengan pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif, masih perlu dirumuskan secara ilmiah.

Dengan demikian, pengembangan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam penelitian ini akan memperluas dimensi dari konsep internalisasi nilai yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah inklusif, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan program pembinaan perilaku siswa, khususnya terkait dengan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam mendukung keberhasilan implementasi pendidikan inklusif.
2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebersamaan, khususnya antara ABK dengan peserta didik reguler, baik dalam pembelajaran di kelas, maupun kegiatan di luar kelas.
3. Bagi orang tua peserta didik, sebagai bahan masukan dalam membimbing perilaku anak, khususnya terkait dengan strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif.
4. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan informasi ilmiah-empirik untuk mengkaji aspek-aspek lainnya terkait dengan pola pendidikan nilai dalam *setting* sekolah inklusif.

E. Pengorganisasian Disertasi

- Bab 1 : Pendahuluan, memaparkan tentang orientasi atau spektrum penelitian yang akan dilaksanakan, dengan menyajikan paparan mengenai, latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan manfaat penelitian.
- Bab II : Kajian Pustaka, memaparkan analisis konseptual yang berkaitan dengan strategi internalisasi nilai kebersamaan, konstruk strategi internalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam *setting* sekolah inklusif, konsep dan implementasi pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan sekolah inklusif, pendidikan inklusif sebagai perwujudan keadilan sosial di bidang pendidikan, kaitan antara pendidikan berbasis keadilan sosial dengan pendidikan inklusif, spektrum penelitian dalam kaitannya dengan pendidikan umum, dan hasil penelitian dalam setting pendidikan inklusif.
- Bab III : Metode Penelitian, memaparkan langkah-langkah secara operasional penelitian kualitatif, meliputi uraian mengenai, lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan definisi konseptual.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan temuan data lapangan sesuai dengan spektrum penelitian yang dilaksanakan, dan diakhiri dengan pembahasan hasil penelitian sebagai upaya pemaknaan atas data hasil penelitian.
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi, merupakan bab terakhir dari laporan penelitian ini yang merupakan intisari dan makna penelitian yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan.